



## Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah dan Pajak Pusat dalam Mendukung Pembiayaan Infrastruktur serta Layanan Publik di Indonesia

**Nova Sulistiani Safitri**

[safitrinova311@gmail.com](mailto:safitrinova311@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Thania Ramadhani**

[thaniirama1119@gmail.com](mailto:thaniirama1119@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Haykal Ramadhan**

[haykalr0906@gmail.com](mailto:haykalr0906@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Dini Vientiany**

[Dini1100000167@uinsu.ac.id](mailto:Dini1100000167@uinsu.ac.id)

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: [thaniirama1119@gmail.com](mailto:thaniirama1119@gmail.com)

**Abstract.** *Taxes are considered one of the main financial resources used by the government to carry out national and regional development programs in Indonesia. Both central and regional taxes have an essential role in supporting infrastructure projects and improving the quality of services provided to the public. This research was conducted to examine how effective central and regional taxes are in financing infrastructure development and public services in Indonesia. The study used a qualitative descriptive approach through literature review methods by analyzing information obtained from journals, books, government regulations, and official reports related to taxation and fiscal policy. The results reveal that central taxes remain the largest contributor to state revenue and are widely used to fund national development programs, especially infrastructure and public service sectors. On the other hand, regional taxes contribute to strengthening local financial independence and assisting local governments in meeting community needs through public services and regional development. Despite these contributions, several obstacles are still encountered, such as uneven fiscal capacity between regions, limited tax administration systems, low taxpayer awareness, and coordination problems between central and regional authorities. Therefore, efforts such as improving tax administration, expanding digital tax services, and strengthening fiscal cooperation between governments are needed to optimize tax revenue. Effective tax management is expected to support sustainable development, increase public welfare, and encourage more balanced economic growth throughout Indonesia.*

**Keywords:** *central tax; fiscal policy; infrastructure development; public services; regional tax.*

**Abstrak.** Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama yang digunakan pemerintah untuk menjalankan pembangunan nasional maupun daerah di Indonesia. Pajak pusat dan pajak daerah memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pajak pusat dan pajak daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui pengkajian jurnal, buku, peraturan pemerintah, serta laporan resmi yang berkaitan dengan perpajakan dan kebijakan fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak pusat masih menjadi penyumbang terbesar terhadap penerimaan negara dan digunakan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional, khususnya di bidang infrastruktur dan pelayanan publik. Sementara itu, pajak daerah berfungsi dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan membantu pemerintah daerah menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, pelaksanaan pengelolaan pajak masih menghadapi

beberapa kendala, seperti ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah, rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan sistem administrasi perpajakan, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan administrasi perpajakan, pengembangan layanan pajak berbasis digital, dan penguatan kerja sama fiskal antara pemerintah pusat dan daerah agar penerimaan pajak dapat lebih optimal. Pengelolaan pajak yang efektif diharapkan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan pemerataan pembangunan di Indonesia.

**Kata kunci:** infrastruktur; kebijakan fiskal; pajak daerah; pajak pusat; pelayanan publik.

## **1. LATAR BELAKANG**

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Penerimaan pajak digunakan pemerintah untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pelayanan publik lainnya. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan berbeda dalam pengelolaannya.

Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai kebutuhan nasional melalui APBN. Sementara itu, pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah melalui APBD. Kedua jenis pajak tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik menjadi salah satu indikator penting dalam kemajuan suatu negara. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aktivitas masyarakat, sedangkan pelayanan publik yang berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan pajak sangat diperlukan agar penerimaan negara dan daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah, serta belum optimalnya pengelolaan administrasi perpajakan. Selain itu, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah di beberapa wilayah masih tergolong rendah sehingga daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pajak dari sisi penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi secara umum. Sementara itu, penelitian mengenai efektivitas pajak pusat dan pajak daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas pajak pusat dan pajak daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Indonesia.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Pajak adalah kewajiban masyarakat kepada negara yang dibayarkan berdasarkan ketentuan hukum tanpa mendapatkan balasan secara langsung. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat lainnya. Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi dan membantu pemerataan pendapatan masyarakat.

Di Indonesia, sistem perpajakan dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk membiayai kebutuhan nasional dalam APBN. Beberapa contoh pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM, dan Bea Materai. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah melalui APBD. Pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan jenis pajak daerah lainnya.

Konsep desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah secara mandiri. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah dan mempercepat pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Akan tetapi, kemampuan keuangan setiap daerah berbeda sehingga menyebabkan pembangunan dan pelayanan publik belum merata.

Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh penerimaan pajak. Infrastruktur yang memadai dapat mendukung aktivitas ekonomi dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik yang baik menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengelola penerimaan pajak secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa pajak pusat memiliki kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara dan pembiayaan pembangunan nasional. Sementara itu, pajak daerah berperan penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendukung pembangunan lokal. Namun, pengelolaan perpajakan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan administrasi perpajakan, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang belum optimal.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan pajak pusat dan pajak daerah yang efektif sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Indonesia.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan efektivitas pajak pusat dan pajak daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik di Indonesia. Metode ini dipilih karena penelitian lebih menekankan pada pemahaman dan penjelasan mengenai peran pajak berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi pengelolaan pajak pusat dan pajak daerah, termasuk kontribusi, kendala, dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak untuk pembangunan nasional maupun daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber data berasal dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundangundangan, artikel, dan laporan resmi yang berkaitan dengan perpajakan, kebijakan fiskal, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan mencatat berbagai informasi yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis

menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan membandingkan beberapa sumber dan penelitian terdahulu untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas pajak pusat dan pajak daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Indonesia.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pajak Pusat**

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Dana yang diperoleh dari pajak pusat digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional melalui APBN. Pajak pusat memiliki peran besar dalam pembiayaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi masyarakat, serta berbagai pelayanan publik lainnya.

##### **a. Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada individu maupun badan usaha atas penghasilan yang diperoleh dalam periode tertentu. Penghasilan tersebut dapat berupa gaji, upah, honorarium, laba usaha, maupun pendapatan lainnya. Sistem tarif PPh bersifat progresif, sehingga besarnya pajak disesuaikan dengan jumlah penghasilan wajib pajak.

Jenis Pajak Penghasilan terdiri atas beberapa bagian, yaitu:

1. PPh Pasal 21, yaitu pajak atas gaji, upah, dan penghasilan yang diterima tenaga kerja.
2. PPh Pasal 22, yaitu pajak yang dipungut atas kegiatan impor atau transaksi tertentu.
3. PPh Pasal 23, yaitu pajak atas penghasilan dari jasa, modal, dan kegiatan tertentu.
4. PPh Pasal 24, yaitu kredit pajak luar negeri yang dibayarkan wajib pajak.
5. PPh Pasal 25, yaitu angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan.
6. PPh Pasal 26, yaitu pajak bagi wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.
7. PPh UMKM, yaitu pajak khusus yang dikenakan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pajak Penghasilan menjadi salah satu sumber penerimaan negara terbesar karena mencakup hampir seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam setiap tahap produksi maupun distribusi. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung karena beban akhirnya ditanggung oleh konsumen. Pajak ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara karena hampir seluruh transaksi barang dan jasa dikenakan PPN.

Selain PPN, terdapat Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan terhadap barang tertentu yang tergolong mewah. Pajak ini bertujuan untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari barang bernilai tinggi.

c. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum, seperti surat perjanjian, akta, dan dokumen transaksi lainnya. Pengenaan bea meterai bertujuan memberikan kekuatan hukum terhadap dokumen yang digunakan dalam kegiatan administrasi maupun perjanjian resmi.

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Pajak ini menjadi salah satu sumber penerimaan yang penting karena berkaitan langsung dengan kepemilikan aset masyarakat maupun badan usaha. Dana dari PBB digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas umum dan pelayanan publik.

e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak tanah dan bangunan akibat jual beli, hibah, warisan, atau peralihan hak lainnya. Pajak ini memberikan kontribusi terhadap penerimaan pemerintah dalam sektor pertanahan dan properti.

## **Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Penerimaan pajak daerah digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membiayai pembangunan serta pelayanan masyarakat di daerah masing-masing. Pajak daerah dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

### **a. Pajak Provinsi**

#### **1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor. Dana yang diperoleh biasanya digunakan untuk pembangunan jalan, fasilitas transportasi, dan sarana lalu lintas daerah.

#### **2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Pajak ini dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan digunakan untuk mendukung pembangunan daerah serta pengendalian dampak lingkungan.

#### **3. Pajak Air Permukaan**

Pajak Air Permukaan dikenakan atas pemanfaatan air permukaan oleh individu atau badan usaha tertentu.

#### **4. Pajak Rokok**

Pajak rokok dipungut untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat dan membantu pengawasan konsumsi rokok di daerah.

### **b. Pajak Kabupaten/Kota**

#### **1. Pajak Hotel dan Restoran**

Pajak ini dikenakan atas pelayanan hotel dan restoran. Hasil penerimaannya digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas umum dan pengembangan sektor pariwisata daerah.

#### **2. Pajak Hiburan**

Pajak hiburan dikenakan atas penyelenggaraan berbagai bentuk hiburan seperti bioskop, konser, karaoke, dan tempat hiburan lainnya.

### 3. Pajak Reklame

Pajak reklame dikenakan atas pemasangan media promosi atau iklan di wilayah tertentu.

### 4. Pajak Penerangan Jalan

Pajak ini digunakan untuk mendukung penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum di daerah.

### 5. Pajak Parkir

Pajak parkir dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir yang dikelola oleh pihak tertentu.

### 6. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah dengan tujuan menjaga keseimbangan lingkungan.

### 7. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak ini dikenakan atas kegiatan pengelolaan dan pengambilan sarang burung walet.

### 8. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah.

## **Efektivitas Pajak Pusat terhadap Pembiayaan Infrastruktur dan Pelayanan Publik**

Berdasarkan hasil penelitian, pajak pusat masih menjadi sumber penerimaan terbesar negara dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia. Pajak pusat yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai, serta beberapa jenis pajak lainnya memberikan kontribusi besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut kemudian digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, terutama pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Pembangunan infrastruktur yang didanai melalui penerimaan pajak pusat meliputi pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, jembatan, rumah sakit, sekolah, hingga transportasi umum. Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat memperlancar distribusi barang, mempermudah

mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas perdagangan dan investasi di berbagai wilayah Indonesia.

Selain pembangunan fisik, penerimaan pajak pusat juga digunakan untuk mendukung pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dana pajak dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, subsidi energi, dan program kesejahteraan lainnya. Dengan adanya pembiayaan dari pajak pusat, pemerintah dapat menjalankan berbagai program pelayanan masyarakat secara lebih maksimal dan merata.

Walaupun memiliki kontribusi yang besar, pengelolaan pajak pusat masih menghadapi beberapa hambatan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, praktik penghindaran pajak, serta lemahnya pengawasan perpajakan menyebabkan penerimaan negara belum sepenuhnya optimal. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan negara. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan pembaruan sistem perpajakan melalui digitalisasi layanan, penyederhanaan administrasi, dan peningkatan kualitas pengawasan agar penerimaan pajak dapat meningkat.

### **Efektivitas Pajak Daerah dalam Mendukung Pembangunan Daerah**

Pajak daerah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Pajak daerah menjadi salah satu sumber keuangan utama pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat sesuai kondisi dan potensi masing-masing wilayah.

Pendapatan yang berasal dari pajak daerah digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, penerangan jalan, pelayanan kesehatan daerah, pembangunan pasar, perbaikan jalan lingkungan, serta penyediaan sarana dan prasarana publik lainnya. Jenis pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah yang memiliki penerimaan pajak daerah tinggi cenderung lebih mampu menyediakan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan secara lebih baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah

berpengaruh terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Namun, kontribusi pajak daerah di beberapa wilayah masih tergolong rendah sehingga pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, keterbatasan sistem administrasi perpajakan daerah, serta adanya perbedaan potensi ekonomi antar daerah. Akibatnya, kemampuan fiskal daerah di Indonesia masih belum merata.

### **Kontribusi Pajak Pusat dan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Negara dan Daerah**

Pajak pusat memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara karena mencakup berbagai jenis pajak utama yang memiliki nilai penerimaan tinggi. Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sumber penerimaan terbesar dalam APBN yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan pelayanan publik di seluruh Indonesia.

Sementara itu, pajak daerah berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah masing-masing. Penerimaan pajak daerah membantu pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas umum, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Walaupun kontribusi pajak daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, jumlah penerimaannya masih lebih kecil dibandingkan pajak pusat. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat untuk menjalankan pembangunan daerah.

### **Studi Kasus Banjir Sibolga Tahun 2025 dan Kebijakan Perpajakan**

Hubungan antara kebijakan perpajakan dan kondisi sosial masyarakat dapat dilihat pada peristiwa banjir dan longsor yang terjadi di Kota Sibolga, Sumatera Utara, pada akhir tahun 2025. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan rumah warga, terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, dan terhambatnya pelayanan publik di beberapa wilayah

terdampak. Selain itu, bencana tersebut juga menyebabkan kerugian material dan mengganggu aktivitas masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Dalam kondisi tersebut, masyarakat, organisasi sosial, dan berbagai pihak berupaya memberikan bantuan kepada korban bencana. Akan tetapi, karena banjir dan longsor di Sibolga tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, beberapa barang bantuan dan aktivitas penyaluran tertentu masih mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kondisi tersebut menimbulkan berbagai tanggapan di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa bantuan kemanusiaan untuk korban bencana seharusnya memperoleh keringanan atau pembebasan pajak agar proses penyaluran bantuan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Masyarakat menilai bahwa dalam kondisi darurat, pemerintah perlu memberikan kebijakan khusus untuk mendukung proses pemulihan daerah terdampak bencana.

Di sisi lain, pemerintah tetap menjalankan aturan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku karena status bencana daerah berbeda dengan bencana nasional yang memperoleh fasilitas perpajakan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan kondisi sosial masyarakat.

Kasus banjir Sibolga tahun 2025 menunjukkan bahwa diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel dalam kondisi darurat agar bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan secara maksimal tanpa mengurangi fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara dan pembangunan.

### **Tantangan Pengelolaan Pajak di Indonesia**

Pengelolaan pajak pusat dan pajak daerah masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas penerimaan negara maupun daerah. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak sehingga potensi penerimaan pajak belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, keterbatasan teknologi dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi perpajakan juga masih menjadi masalah, terutama di beberapa daerah. Perbedaan sistem administrasi dan kebijakan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah turut menyebabkan pengelolaan perpajakan belum berjalan secara optimal.

Ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah juga menjadi tantangan dalam menciptakan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. Daerah yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi cenderung memperoleh penerimaan pajak lebih besar dibandingkan daerah yang memiliki potensi ekonomi rendah. Akibatnya, pembangunan antar daerah masih belum merata.

### **Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak**

Untuk meningkatkan efektivitas pajak dalam mendukung pembangunan, diperlukan berbagai upaya perbaikan dalam sistem perpajakan. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak melalui edukasi dan sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Selain itu, penguatan sistem administrasi perpajakan melalui digitalisasi layanan dan pemanfaatan teknologi informasi perlu terus dikembangkan agar proses pembayaran, pelaporan, dan pengawasan pajak menjadi lebih mudah, efektif, dan transparan. Digitalisasi juga dapat membantu mengurangi praktik penyalahgunaan pajak dan meningkatkan efisiensi pelayanan perpajakan.

Pemerintah pusat dan daerah juga perlu memperkuat koordinasi dalam pengelolaan perpajakan guna menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan harmonis. Dengan pengelolaan pajak yang baik, penerimaan negara dan daerah dapat meningkat sehingga pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak pusat dan pajak daerah memiliki hubungan yang saling mendukung dalam pembiayaan pembangunan nasional maupun daerah. Oleh karena itu, pengelolaan perpajakan yang efektif menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pajak pusat dan pajak daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Indonesia. Pajak pusat masih menjadi sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan nasional, seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi umum, dan program bantuan sosial bagi masyarakat. Di sisi lain, pajak daerah berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik sesuai kondisi daerah masing-masing.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas administrasi perpajakan, penggunaan teknologi, serta hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Walaupun penerimaan pajak terus meningkat, masih terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, keterbatasan sumber daya manusia, dan perbedaan kemampuan fiskal antar daerah.

Selain itu, studi kasus banjir yang terjadi di Kota Sibolga pada tahun 2025 memperlihatkan bahwa kebijakan perpajakan juga berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Tidak ditetapkannya banjir tersebut sebagai bencana nasional menyebabkan beberapa bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak masih dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan dalam situasi darurat masih perlu mendapatkan perhatian agar bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan dengan lebih maksimal.

### **Saran**

Pemerintah diharapkan dapat terus melakukan perbaikan dalam sistem perpajakan melalui pengembangan layanan digital, peningkatan pengawasan, serta pemberian edukasi perpajakan kepada masyarakat agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Selain itu, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

juga perlu diperkuat supaya pengelolaan perpajakan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kondisi bencana atau keadaan darurat, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kebijakan perpajakan yang lebih fleksibel terhadap bantuan sosial dan bantuan kemanusiaan agar proses penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak dapat berlangsung lebih cepat dan tidak menimbulkan beban tambahan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan hanya berdasarkan studi literatur tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode penelitian yang lebih luas dan data yang lebih lengkap agar hasil penelitian mengenai efektivitas pajak pusat dan pajak daerah dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan akurat.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Azzahra, I., & Nisa, K. (2025). Analisis Peran Pajak Daerah Dan Pajak Pusat Dalam Pendapatan Negara: Perspektif Fiskal Dan Ekonomi. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 1823-1827.
- Della Nabila, D. T., Hikmiyah, A., & Fatimah, S. (2023). Pajak Pusat Dan Pajak Daerah Atas Pemakaian Listrik Rumah Tangga Pada Pt. Pln (Persero) Up3 Mataram. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 4(1), 22-34.
- Hafiz, M., Wardana, A. T., Wahid, W., & Vientiany, D. (2025). PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH. *Musyitari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 19(1), 111-120.
- Nabawi, A. N., Absy, K. I., Dalimunthe, S. R., & Vientiany, D. (2025). Pajak pusat dan pajak daerah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(01), 1737-1744.
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung, 10, 1-14.
- Vientiany, D., Nabila, N., Nadilla, T., & Bastian, V. F. (2024). Pajak Negara Dan Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 813-818.